



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: <b>I (satu).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: <b>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 16 Desember 2019.</b>
Pukul	: <b>19.00 – 02.46 Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SH.,MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2020;</b> <b>2. Lain-lain.</b>
Hadir Komisi X DPR RI	: 44 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Saudara Wishnutama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.46 WIB oleh **Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.**

**A. Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2020**

1. Dalam persiapan pelaksanaan APBN TA 2020, Komisi X DPR RI dan Kemenparekraf RI sepakat pelaksanaan program dan kegiatan Kemenparekraf RI akan memperhatikan saran dan masukan Komisi X DPR RI, dengan beberapa catatan sebagai berikut:
  - a. Mendukung Kemenparekraf RI untuk melakukan upaya peningkatan devisa melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, peningkatan SDM, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif.

- b. Mengapresiasi dan mendukung upaya inovatif Kemenparekraf RI untuk melakukan promosi dan pemasaran ekonomi kreatif, seperti jendela Indonesia (film, restoran, kopi, batik, dan teh), dan aplikasi dengan menciptakan kompetisi yang adil antara aplikasi asing dan lokal.
  - c. Dalam penyesuaian struktur Kementerian/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Komisi X DPR RI meminta Kemenparekraf RI untuk mempertegas posisi Ekraf dengan pariwisata dan sektor lainnya, mengingat Ekraf tidak hanya terkait dengan pariwisata.
  - d. Memastikan 5 destinasi pariwisata super-prioritas mampu meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia, meningkatkan kontribusi devisa negara, dan meningkatkan tenaga kerja Indonesia pada tahun 2020.
  - e. Mendorong Kemenparekraf RI melakukan koordinasi dengan Kemenpora RI untuk mengembangkan wisata olahraga (*sport tourism*) dan ekonomi kreatif.
  - f. Pembangunan dan pengembangan pariwisata selain diarahkan kepada kepentingan ekonomi, juga perlu dijadikan sebagai instrumen diplomasi budaya.
  - g. Mendorong Kemenparekraf RI untuk mengembangkan desa wisata, sekaligus menjadi penopang destinasi wisata di daerah.
  - h. Meminta Kemenparekraf RI untuk mengkaji efektivitas keberadaan Badan Otorita Pelaksana (BOP) pariwisata, dan dikaitkan juga dengan pelaksanaan Pasal 97 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Komisi X DPR RI mendukung Kemenparekraf RI untuk menyusun Rencana Induk Terintegrasi pembangunan pariwisata nasional, dengan tetap menekankan seluruh daerah telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
  3. Dalam rangka penyusunan rencana induk terintegrasi pembangunan pariwisata nasional, perlu memperhatikan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  4. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf RI untuk segera menyusun dan menyelesaikan peraturan pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
  5. Anggaran sebesar Rp100 Miliar yang dialokasikan untuk Badan Pelaksana Otorita Danau Toba yang masih diblokir, Komisi X DPR RI akan melakukan pembahasan dalam rapat kerja secara khusus dalam pengambilan keputusannya.
  6. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Kemenhub RI dan KemenPU PR RI dalam rangka mendapatkan dukungan infrastruktur pariwisata.
  7. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo RI dalam rangka membangun citra pariwisata Indonesia.

## B. Lain-Lain

Komisi X DPR RI mengharapkan Kemenparekraf RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota Komisi X DPR RI yang belum terjawab, paling lambat 31 Desember 2019.

## III. PENUTUP

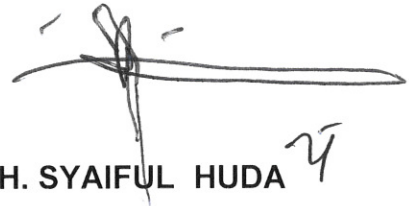
Rapat Kerja ditutup pukul 02.46 Wib hari selasa 17 Desember 2019

MENPAREKRAF RI,



WISHNUTAMA KUSUBANDIO

KETUA RAPAT,



H. SYAIFUL HUDA